



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN  
**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT**  
Jl. Bhayangkara No. 9 Bandar Jaya Lahat 31414  
Telephone : (0731) 325738 Facsimile : (0731) 325738  
Website : <http://bapaslahat.kemenkumham.go.id> Email : [bapaslahat@ymail.com](mailto:bapaslahat@ymail.com)

31 Desember 2023

Nomor : W.6.PAS.PAS21-PR.03-1167  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023  
Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

Yth.

Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan  
di -  
Palembang

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Nomor : W.6.PR.03-0325 tanggal 30 November 2023 Perihal Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Besama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Perimansyah  
Nip. 19681106 199203 1 002

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan kasih Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2023 ini adalah wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan kepada publik, sebagai kontrol dari masyarakat atas kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dalam kurun waktu 1 Tahun. Pada laporan ini disajikan Perencanaan Kinerja Tahun 2023, yang disertai target dan realisasi berupa output yang terukur secara jelas melalui indikator capaiannya.

Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "**good governance**".

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 ini menjelaskan berbagai capaian dan permasalahan serta solusi yang mewarnai kinerja sepanjang Tahun 2023. Apresiasi layak diberikan kepada seluruh insan pengayoman Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat yang telah bekerja keras dan memberikan dedikasi positif dalam pencapaian kinerja melalui sasaran kegiatan yang menjadi tanggung jawab. Kedepan, akan dilakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk menjadikan Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat lebih **PASTI ( Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif)** dan **Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)**, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan public kepada Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat.

Lahat, 31Desember2023

Kepala,



**Perimansyah**

NIP. 19681106 199203 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat kepada publik atas pelaksanaan mandat konsistensi dan visi-misi Presiden yang diturunkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Renacana Strategis (Renstra) Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2020-2024 yang terdiri dari 2 (Dua) Sasaran Kegiatan dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan.

Secara keseluruhan capaian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2023 dapat dinyatakan **“berhasil”**, karena telah memenuhi target capaian dan telah terealisasi. Kedepan untuk mencapai visi dan misi Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat diperlukan koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah yang dilakukan dengan lebih intensif. Dalam mendukung capaian kinerja Tahun 2023 Pagu Anggaran sebesar **Rp 3.733.357.000,-** telah direalisasi sebesar **Rp 3.695.296.033,-** atau sebesar **98,98%**. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran sebagaimana dijelaskan tersebut di atas menunjukkan adanya efektivitas penggunaan anggaran.

Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya. Pencapaian tersebut sejalan dengan target-target pada sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Anggaran tersebut digunakan secara akuntabel dan transparan yang berlandaskan tata nilai **“PASTI”** yaitu **Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif**, sehingga menghasilkan capaian-capaian sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja %
1.	Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	49,26%	82,09%
		Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	60,93%	110,78%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	39,07%	111,63%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja %
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtangga	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah Kendaraan Bermotor	10 Unit	10 Unit	100%
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	54 Unit	54 Unit	100%
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	52 Unit	52 Unit	100%
		Jumlah Gedung/ Bangunan	1 Unit	1 Unit	100%
		Nilai Rata-rata			

Adapun Sasaran Kegiatan yang telah dicapai sepanjang Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 dengan Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 1), "Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga" dengan target persentase 60% telah direalisasi 49,26% atau tercapai kinerja sebesar 82,09%, Indikator Kinerja Kegiatan 2 (IKK 2), "Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara" dengan target persentase 55% telah direalisasi 60,93% atau tercapai kinerja sebesar 110,78%, Indikator Kinerja Kegiatan 3 (IKK 3), "Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya" dengan target persentase 35% telah direalisasi 39,07% atau tercapai kinerja sebesar 111,63%,
2. Sasaran Kegiatan 2 dengan Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 1), "Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu" dengan target 1 layanan, telah direalisasi 1 layanan atau tercapai kinerja sebesar

100%, Indikator Kinerja Kegiatan 2 (IKK 2), “Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan” dengan target 1 layanan, telah direalisasi 1 layanan atau tercapai kinerja sebesar 100%, Indikator Kinerja Kegiatan 3 (IKK 3), “Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan” dengan target 1 layanan, telah direalisasi 1 layanan atau tercapai kinerja sebesar 100%, Indikator Kinerja Kegiatan 4 (IKK 4), “Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu” dengan target 1 layanan, telah direalisasi 1 layanan atau tercapai kinerja sebesar 100%, Indikator Kinerja Kegiatan 5 (IKK 5), “Jumlah Layanan Perkantoran” dengan target 1 layanan, telah direalisasi 1 layanan atau tercapai kinerja sebesar 100%, Indikator Kinerja Kegiatan 6 (IKK 6), “Jumlah Kendaraan Bermotor” dengan target 10 unit, telah direalisasi 10 unit atau tercapai kinerja sebesar 100%, Indikator Kinerja Kegiatan 7 (IKK 7), “Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi” dengan target 54 unit, telah direalisasi 54 unit atau tercapai kinerja sebesar 100%, Indikator Kinerja Kegiatan 8 (IKK 8), “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran” dengan target 52 unit, telah direalisasi 52 unit atau tercapai kinerja sebesar 100%, Indikator Kinerja Kegiatan 9 (IKK 9), “Jumlah Gedung/Bangunan” dengan target 1 unit, telah direalisasi 1 unit atau tercapai kinerja sebesar 100%,

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG	<b>1</b>
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	<b>2</b>
C. MAKSUD DAN TUJUAN	<b>3</b>
D. ASPEK STRATEGIS	<b>4</b>
E. ISU STRATEGIS	<b>4</b>
F. SISTEMATIKA LAPORAN	<b>5</b>
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. RENCANA STRATEGIS	<b>7</b>
B. PERJANJIAN KINERJA	<b>11</b>
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	<b>16</b>
B. REALISASI ANGGARAN	<b>46</b>
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	<b>48</b>
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	<b>50</b>
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN	<b>55</b>
B. SARAN	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	
3. PRESTASI/PENGHARGAAN	

## DAFTAR TABEL

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
III.1	Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2023 Bapas Kelas II Lahat	16
III.2	Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023	16
III.3	Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 1	19
III.4	Perbandingan Capaian Kinerja SK I dan IKK 1	20
III.5	Target Jangka Menengah SK I dan IKK 1	20
III.6	Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 2	22
III.7	Perbandingan Capaian Kinerja SK I dan IKK 2	22
III.8	Target Jangka Menengah SK I dan IKK 2	23
III.9	Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 3	24
III.10	Perbandingan Capaian Kinerja SK I dan IKK 3	25
III.11	Target Jangka Menengah SK I dan IKK 3	25
III.12	Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 1	28
III.13	Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 1	29
III.14	Target Jangka Menengah SK II dan IKK 1	29
III.15	Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 2	30
III.16	Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 2	31
III.17	Target Jangka Menengah SK II dan IKK 2	31
III.18	Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 3	32
III.19	Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 3	33
III.20	Target Jangka Menengah SK II dan IKK 3	33
III.21	Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 4	34
III.22	Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 4	35
III.23	Target Jangka Menengah SK II dan IKK 4	35

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
III.24	Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 5	36
III.25	Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 5	37
III.26	Target Jangka Menengah SK II dan IKK 5	37
III.27	Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 6	38
III.28	Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 6	39
III.29	Target Jangka Menengah SK II dan IKK 6	39
III.30	Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 7	40
III.31	Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 7	40
III.32	Target Jangka Menengah SK II dan IKK 7	41
III.33	Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 8	42
III.34	Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 8	42
III.35	Target Jangka Menengah SK II dan IKK 8	43
III.36	Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 9	44
III.37	Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 9	44
III.38	Target Jangka Menengah SK II dan IKK 9	45
III.39	Persentase Capaian Kinerja pada Sasaran Kegiatan Bapas Kelas II Lahat Tahun 2023	46
III.40	Rincian PAGU serta Realisasi Anggaran Bapas Kelas II Lahat per Jenis Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2023	47

**DAFTAR GAMBAR**

<b>NO. GAMBAR</b>	<b>URAIAN</b>	<b>HALAMAN</b>
I.1	Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat	<b>3</b>
II.1	Core Values Ber-AKHLAK	<b>10</b>
III.1	Sasaran Kegiatan I dan 3 Indikator Kinerja Kegiatan	<b>18</b>
III.2	Sasaran Kegiatan II dan 9 Indikator Kinerja Kegiatan	<b>27</b>
III.3	Screenshoot Aplikasi SMART-DJA Tahun 2023	<b>48</b>
III.4	Dashboard Nilai IKPA Tahun 2023	<b>49</b>
III.5	Screenshoot Aplikasi E-Performance Tahun 2023	<b>52</b>
III.6	Screenshoot Aplikasi E-Tarja Tahun 2023	<b>53</b>
III.7	Screenshoot Aplikasi E-Monev BAPPENAS Tahun 2023	<b>53</b>
III.8	Screenshoot Prioritas Nasional Kemenkumham Tahun 2023	<b>54</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

LkjIP Tahun 2023 Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

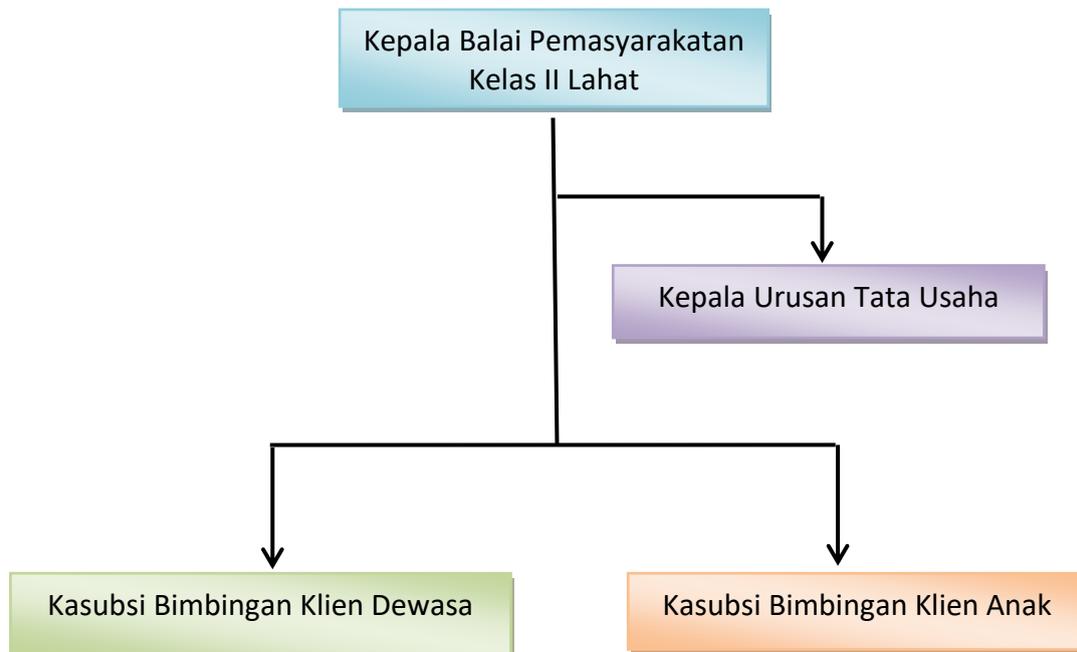
## **B. TUGAS, FUNGSIDAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.02-PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak, Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
- b. Melakukan registrasi klien Pemasarakatan;
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- d. Mengikuti siding peradilan di Pengadilan Negeri dan siding Dewan Pembina Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemasarakatan yang memerlukan;
- f. Melakukan urusan tata usaha Balai.

Struktur organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat terdiri dari Kepala Balai Pemasarakatan, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak. Kepala Bapas Kelas II Lahat mempunyai tugas membantu Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas di bidang Penelitian, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan Klien. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat secara keseluruhan yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan dan umum. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa mempunyai tugas meningkatkan pelayanan

dan administrasi yang menyangkut bidang registrasi, bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja terhadap Klien Dewasa. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak mempunyai tugas meningkatkan pelayanan dan administrasi yang menyangkut bidang registrasi, bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja terhadap Klien Anak. Berikut ini merupakan Struktur Organisasi pada Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat.



Gambar I.1 Struktur Organisasi Pemasarakatan Kelas II Lahat

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

#### D. ASPEK STRATEGIS

Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk bahan peradilan, membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam persidangan anak
2. Melakukan Registrasi klien Pemasyarakatan;
3. melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan anak
4. Mengikuti sidang pengadilan anak di Pengadilan Negeri dan Sidang Diversi serta sidang pembinaan pemasyarakatan di Lapas/Rutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas napi, anak didik dan Klien Pemasyarakatan yang membutuhkan *after care*;
6. Melakukan urusan tata usaha Balai

#### E. ISU STRATEGIS

1. Komitmen melayani dari para pegawai yang masih perlu ditingkatkan, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu dimaksimalkan. Selain itu, Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat sebagai bagian dari Sistem Tata Peradilan dalam pelaksanaan tugas, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, sebagai dampak dari perubahan arus transformasi dan perkembangan politik.
2. Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat telah menerima hibah berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten Lahat, akan tetapi pihak TNI KODIM 405 Lahat (KODAM II SRIWIJAYA) menyatakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah milik TNI AD.
3. Dalam pelaksanaan pelayanan terhadap Klien, Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat telah membuat inovasi berupa **Aplikasi “Si Balan” (Sistem Informasi Bapas Lahat Alap Nian)**, dimana pengguna layanan dapat mengetahui data Klien, penelusuran Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), data bimbingan, wajib lapor Klien dan lainnya.

## F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

**KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2023.

**RINGKASAN EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2023.

### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **BAB IV        PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2023 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2024

- LAMPIRAN**
- Perjanjian kinerja tahun 2022;
  - Perjanjian kinerja tahun 2023;
  - Prestasi dan penghargaan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

##### a. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurunwaktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses,tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah ***making delivered***, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkanbahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawahkepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'rufAmin adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *OmnibusLaw*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi ; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

## b. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan public di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual,keimigrasian, administrasi hukum umum, dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat ; dan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

## c. TATANILAI

### 1) TataNilaiCoreValuesASNBerAKHLAK

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *corevalues* ASN '**BerAKHLAK**' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "**BerAKHLAK**" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.



Gambar II.2 Core Values ASN Ber-AKHLAK

## 2) TataNilaiPASTI

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (*values*) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada didalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi *problemsolver* bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
- Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait

dengan sumber/*input* proses yang dilakukan dan hasil/*output* yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggung jawab kan kinerjanya kepada masyarakat.

- c) Sinergi adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, *feedback* cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
- d) Transparan adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e) Inovatif adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumberdaya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri atau pun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga.

- Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Permansyah  
 Jabatan : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ilham Djaya  
 Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

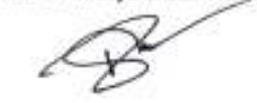
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2023

Pihak Kedua,  
 Kepala Kantor Wilayah  
 Kementerian Hukum dan HAM  
 Sumatera Selatan

  
 Ilham Djaya  
 NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,  
 Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

  
 Permansyah  
 NIP. 196811061992031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pamasarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaaan	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	10 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	54 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	52 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 564.845.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 564.845.000,-
Program DukunganManajemen	Rp. 2.662.493.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 2.662.493.000,-

Palembang, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan



Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat



Perimansyah  
NIP. 196811061992031002

Visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagaiberikut:

1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk bahan peradilan, membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam persidangan anak
2. Melakukan Registrasi klien Pemasyarakatan;
3. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan anak
4. Mengikuti sidang pengadilan anak di Pengadilan Negeri dan Sidang Diversi serta sidang pembinaan pemasyarakatan di Lapas/Rutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas napi, anak didik dan Klien Pemasarakatan yang membutuhkan *after care*;

6. Melakukan urusan tata usaha Balai

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka disusun sasaran kegiatan yang memiliki indikator kinerja kegiatan dengan target yang harus dicapai Bapas kelas II Lahat terdapat 2 (Dua) Sasaran Kegiatan dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat yakni:

1. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar.
2. Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker.

Untuk mencapai sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada tahun 2023, Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat memperoleh anggaran sebesar **Rp 3.733.357.000,-** dan telah berhasil direalisasikan sebesar **Rp 3.695.296.033,-** atau sebesar **98,98%**.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIANKINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Kegiatan menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan.

Tabel III.1. Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2023 Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

No	Sasaran Kegiatan	Jumlah IKK	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai standar	3	101,5%	Tercapai
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	9	100%	Tercapai

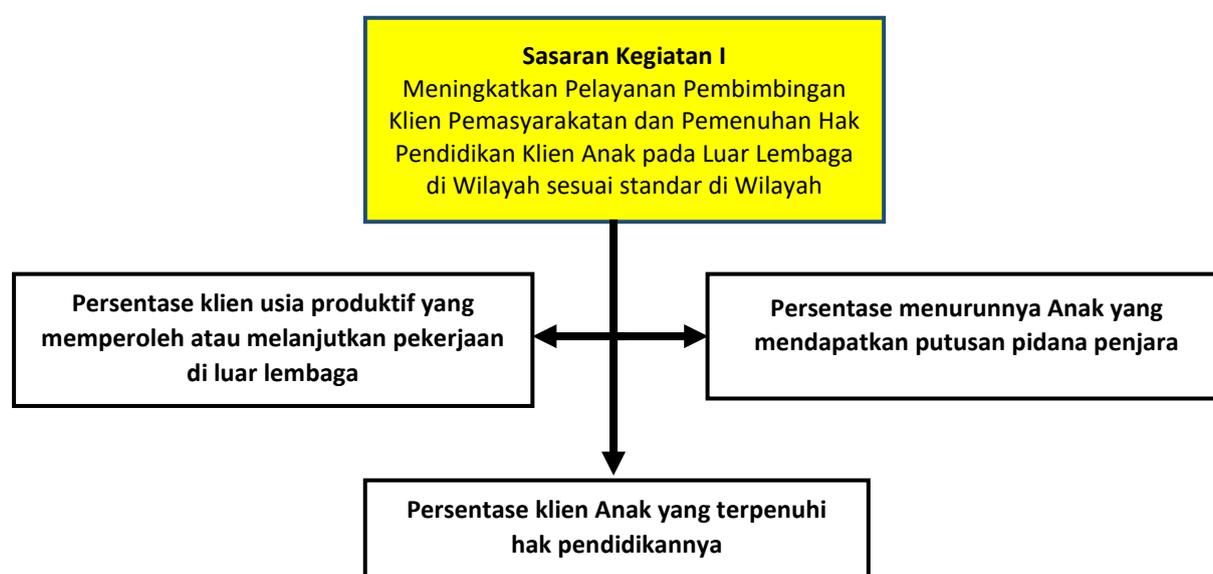
Tabel III.2. Capaian Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	49,26%	82,09%
		Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	60,93%	110,78%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	39,07%	111,63%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Jumlah Kendaraan Bermotor	10 Unit	10 Unit	100%
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	54 Unit	54 Unit	100%
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	52 Unit	52 Unit	100%
		Jumlah Gedung/ Bangunan	1 Unit	1 Unit	100%
Nilai Rata-rata					100,39%

Sasaran Kegiatan I
Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai standar

Sasaran Kegiatan ini diperoleh dari 3 indikator kinerja kegiatan yaitu yaitu : Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga dengan target 60%, Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dengan target 55% dan Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya dengan target 35%.



Gambar III.1. Sasaran Kegiatan I dan 3 Indikator Kinerja Kegiatan

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023**

Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga merupakan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Sasaran Kegiatan I pada Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat. Capaian kinerja persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga diperoleh dari jumlah klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dibagi dengan jumlah klien usia produktif, dikali dengan 100% dengan target kinerja 60%.

Tabel III.3 Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	49,26%	82,09%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga}}{\text{Jumlah Klien Usia Produktif}} \times 100\% \\ &= \frac{629}{1277} \times 100\% = 49,26\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-1 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{49,26\%}{60\%} \times 100\% = 82,09\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2023, Jumlah Klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga pada Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat berjumlah 629 orang dengan Jumlah Klien Usia Produktif sebanyak 1277 orang, maka diperoleh realisasi sebesar 49,26% dengan target kinerja 60%.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perbandingan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, capaian persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga pada Tahun 2022 yaitu 100% dengan target kinerja 50% dan realisasi sebesar 50% sedangkan pada Tahun 2023 diperoleh capaian kinerja sebesar 82,09% dengan target kinerja 60% dan realisasi 49,26%.

Tabel III.4 Perbandingan Capaian Kinerja SK I dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	50%	100%	60%	49,26%	82,09%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Pada tahun 2021 persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga belum termasuk dalam indikator kinerja kegiatan. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga mulai menjadi indikator kinerja kegiatan pada tahun 2022 dengan target 50%, kemudian pada tahun 2023 terjadi peningkatan persentase target dengan nilai 60% dan untuk tahun 2024 target persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga tetap pada 60%.

Tabel III.5 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	-	50%	60%	60%

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyusun program pembimbingan Klien Masyarakat dalam rangka menentukan kegiatan bimbingan; melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka pembimbingan kepribadian ataupun

kemandirian terhadap Klien Pemasarakatan; melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka pembimbingan kepribadian atau kemandirian; melakukan evaluasi perkembangan bimbingan Klien Pemasarakatan secara berkala; melaksanakan program pengawasan terhadap Klien terkait dengan program bimbingan yang sedang dijalani; dan membangun jejaring kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Pokmas Lipas (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan) dalam rangka melaksanakan program bimbingan kepribadian maupun kemandirian terhadap Klien Pemasarakatan.

#### **6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan ialah dengan Membangun dan meningkatkan Jejaring, kerjasama dengan pihak-pihak terkait terutama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan, sehingga Klien Pemasarakatan dapat tersalurkan dalam mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki; mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk menambah jumlah Pembimbing Kemasyarakatan melalui Analisis Beban Kerja dan kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan.

#### **• Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara”**

##### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara merupakan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Sasaran Kegiatan I Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat. Capaian kinerja Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara didapatkan dari Jumlah Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara dibagi jumlah pendampingan anak dikali 100% dengan target 55%. Didapatkan pada Tahun 2023 realisasi pada indikator kinerja kegiatan ini ialah 60,93% dengan target kinerja 55%.

Tabel III.6 Capaian Target dan Realisasi SK I dan IKK 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	60,93%	110,78%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara}}{\text{Jumlah Pendampingan Anak}} \times 100\% \\ &= \frac{92}{151} \times 100\% = 60,93\% \\ \text{Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-2 adalah:} \\ &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{60,93\%}{55\%} \times 100\% = 110,78\% \end{aligned}$$

Pada Tahun 2023 Jumlah Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara ialah 92 anak dan jumlah pendampingan anak sebanyak 151 anak. Dari jumlah tersebut maka diperoleh realisasi sebesar 60,93% dengan target kinerja 55%.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara Tahun 2023 sebesar 60,93% dengan target kinerja 55% sedangkan pada Tahun 2022 sebesar 60% dengan target kinerja 60%, disini terlihat bahwa pada Tahun 2023 terjadi peningkatan persentase realisasi kinerja dibandingkan persentase realisasi kinerja pada Tahun 2022.

Tabel III.7 Perbandingan Capaian Kinerja SK I dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	60%	100%	55%	60,93%	110,78%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator kinerja kegiatan Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara belum terdapat pada tahun 2021. Indikator kinerja kegiatan ini ada pada tahun 2022 dengan target kinerja sebesar 60%. Namun pada tahun 2023 dan tahun 2024 target Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara mengalami penurunan, yaitu sebesar 55%.

Tabel III.8 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	-	60%	55%	55%

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pendampingan untuk anak usia di bawah 12 tahun yang berhadapan dengan hukum pada saat pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara anak; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan awal di tingkat penyidikan; melaksanakan tugas sebagai wakil fasilitator pada proses musyawarah/ mediasi dalam rangka pelaksanaan diversifikasi; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka pemeriksaan anak di Kejaksaan pada saat pelimpahan berkas perkara dari Kepolisian; melakukan kegiatan pendampingan musyawarah atau mediasi bagi perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversifikasi; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak pada pelaksanaan kesepakatan diversifikasi/ penetapan pengadilan/ putusan pengadilan dalam rangka memastikan kesiapan anak dan pihak terkait; melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak dalam rangka memberikan pertimbangan atau rekomendasi pada proses persidangan.

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pemasarakatan terutama Pembimbing Kemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan maupun diklat teknis yang berkaitan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan mengusulkannya kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM (BPSDM Kemenkumham).

### • Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya”

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya merupakan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Sasaran Kegiatan I Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat. Capaian kinerja Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya didapatkan dari Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan dibagi dengan jumlah klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dikali 100% dengan target kinerja 35%. Didapatkan persentase realisasi kinerja sebesar 39,07% dengan target kinerja 35%.

Tabel III.9 Capaian target dan realisasi SK I dan IKK 3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai standar	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	39,07%	111,63%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan}}{\text{Jumlah Klien Anak}} \times 100\% \\ &= \frac{59}{151} \times 100\% = 39,07\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-3 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{39,07\%}{35\%} \times 100\% = 111,63\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2023 jumlah klien anak yang melanjutkan pendidikan ialah sebanyak 59 anak dengan jumlah klien anak Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat sebanyak 151 anak. Dari jumlah klien anak yang melanjutkan pendidikan tersebut didapatkan realisasi sebesar 39,07% dan capaian kinerja 111,63%.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perbandingan pada Tahun 2023 dan Tahun 2022, capaian Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2022 sebesar 100% sedangkan tahun 2023 sebesar 111,63%. Dimana target kinerja pada Tahun 2022 sebesar 30% dengan realisasi 30% sedangkan pada tahun 2023 target kinerja sebesar 35% dengan realisasi sebesar 39,07%.

Tabel III.10 Perbandingan Capaian Kinerja SK I dan IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	30%	100%	35%	39,07%	111,63%

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Pada tahun 2021, Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya belum terdapat pada indikator kinerja kegiatan. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya baru ada pada tahun 2022 dengan target kinerja 30%. Kemudian pada tahun 2023 target kinerja persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya ditingkatkan menjadi 35%.

Tabel III.11 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	-	30%	35%	35%

## 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan

Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### **5. Penyebab Keberhasilan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan penelitian kemasyarakatan dalam rangka memberikan program baik itu perawatan/ pelayanan ataupun pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; melakukan kegiatan pengawasan proses upaya diversi dalam rangka terlaksananya diversi; melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan penetapan hasil diversi atau putusan hakim terhadap anak; melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program perawatan dan layanan tahanan anak berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan; melaksanakan kegiatan pengawasan program pembinaan anak di Lapas atau Rutan berdasarkan hasil rekomendasi penelitian kemasyarakatan.

#### **6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat terutama Pembimbing Masyarakat melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan maupun diklat teknis yang berkaitan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan mengusulkannya kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM (BPSDM Kemenkumham).



Sasaran Kegiatan ini diperoleh dari 9 indikator kinerja kegiatan yaitu yaitu : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu dengan target 1 layanan, Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtangaan dengan target 1 layanan, Terpenuhiya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan dengan target 1 layanan, Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu dengan target 1 layanan, Jumlah Layanan Perkantoran dengan target 1 layanan, Jumlah kendaraan bermotor dengan target 10 unit, Jumlah Perangkat pengolah data dan komunikasi dengan target 54 unit, Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran dengan target 52 unit dan Jumlah gedung/ bangunan dengan target 1 unit.



Gambar 3.2. Sasaran Kegiatan II dan 9 indikator Kinerja Kegiatan

• **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu”**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan II. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu telah tercapai dari target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 1 layanan. Telah tercapai realisasinya sebesar 1 layanan sehingga capaian kinerja diperoleh 100%.

Tabel III.12 Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Layanan}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-1 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya.**

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator persentase tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu tahun 2022 sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja 100% tetap pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel III.13 Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, tahun 2022 sebesar 1 layanan, dan realisasi tahun 2023 sebesar 1 layanan. Hal ini diharapkan dapat terealisasi dengan baik setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel III.14 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu dapat dilaksanakan dengan baik karena semua kegiatan dipantau dan dilaporkan langsung kepada Pimpinan (Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat) dan SDM yang memadai.

### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Perlunya pelatihan terkait penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran. Serta

melakukan pendampingan dari operator yang lama ke operator yang baru, mengikutkan operator dalam pelatihan penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran, dan pelaporan, serta secara berkala.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan”**

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan II. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan telah tercapai dari target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 1 layanan. Telah tercapai realisasinya sebesar 1 layanan sehingga capaian kinerja diperoleh 100%.

Tabel III. 15 Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan}}{\text{Jumlah Layanan}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-2 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, realisasi indikator persentase tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan Tahun

2022 sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja 100%, tetap pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel III.16 Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi Tahun 2022 sebesar 1 layanan, dan realisasi Tahun 2023 sebesar 1 layanan. Hal ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel III.17 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	-	1 Layanan	1 Layanan	1Layanan

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Pada pelaksanaannya tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan dapat berjalan dengan baik karena tertibnya administrasi dan barang-barang inventaris sesuai dengan penggunaannya.

### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Perlunya pelatihan terkait Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan yang dilakukan secara berkala dan perlunya rekonsiliasi antara operator BMN dan Bendahara.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan”**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan II. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan telah tercapai dari target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 1 layanan. Telah tercapai realisasinya sebesar 1 layanan sehingga capaian kinerja diperoleh 100%.

Tabel III. 18 Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan}}{\text{Jumlah Layanan}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-3 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya.**

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, realisasi indikator terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja 100% tetap pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel III.19 Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di Tahun 2024 sama dengan Tahun sebelumnya yakni 1 layanan. Target Kinerja untuk Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan Tahun 2023 adalah 1 Layanan dengan realisasi 100%.

Tabel III.20 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan	-	1 Layanan	1 Layanan	1Layanan

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatandapat berjalan dengan baik karena tertibnya administrasi para pegawai dalam melengkapi data pada kepegawaian serta para pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat telah mengikuti uji kompetensi masing- masing sesuai tupoksi nya.

### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Perlunya sosialisasi kepada pegawai yang belum memahami aplikasi simpeg serta melakukan pengecekan rutin terhadap berkas (dossier) pada aplikasi simpeg dan mengingatkan pegawai terkait dossier yang belum lengkap pada aplikasi. Untuk

meningkatkan kompetensi pegawai perlunya pengajuan secara berkala pegawai yang akan diikuti sertakan dalam pengembangan kompetensi.

• **Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu”**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktumerupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan II. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan telah tercapai dari target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 1 layanan. Telah tercapai realisasinya sebesar 1 layanan sehingga capaian kinerja diperoleh 100%.

Tabel III. 21 Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Layanan}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-4 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya.**

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dengan Tahun 2022, realisasi indikator tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel

dan tepat waktu sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja 100% tetap pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 1 layanan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel III.22 Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi Tahun 2022 sebesar 1 layanan, dan realisasi Tahun 2023 sebesar 1 layanan. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel III.23 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	-	1 layanan	1 Layanan	1Layanan

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu dapat dilaksanakan dengan baik karena semua kegiatan dipantau dan dilaporkan langsung kepada Pimpinan (Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat) dan SDM yang memadai serta pelaksanaan koordinasi ke Kantor Wilayah dan KPPN.

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Perlunya diadakan pelatihan terkait dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan secara berkala.

### • Indikator Kinerja Kegiatan 5 “Jumlah Layanan Perkantoran”

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Jumlah layanan perkantoran merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan II. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah layanan perkantoran telah tercapai dari target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 1 layanan. Telah tercapai realisasinya sebesar 1 layanan sehingga capaian kinerja diperoleh 100%.

Tabel III. 24 Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 5

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah layanan perkantoran}}{\text{Jumlah Layanan}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-5 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

#### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian kinerja Tahun 2022, tidak terdapat Indikator kinerja kegiatan pada tahun tersebut sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan. Dimana diketahui untuk realisasi Jumlah layanan perkantoran pada Tahun 2023 yaitu 1 Layanan dengan persentase Capaian Kinerja 100%.

Tabel III.25 Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 5

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah layanan perkantoran	-	-	-	1 Layanan	1 Layanan	100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2024 sama dengan Tahun sebelumnya yakni 1 layanan. Target Kinerja untuk Jumlah layanan perkantoran Tahun 2023 adalah 1 Layanan dengan realisasi 100%. Dimana pada tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat indicator kinerja kegiatan tersebut.

Tabel III.26 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 5

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah layanan perkantoran	-	-	1 Layanan	1Layanan

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Jumlah layanan perkantoran hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Pelaksanaan layanan perkantoran Bapas Kelas II Lahat seperti arsiparis data pegawai, surat masuk dan keluar sudah dilakukan secara elektronik, serta untuk menjaga disiplin pegawai, absesensi telah dilaksanakan menggunakan finger print dan terhubung dalam aplikasi SIMPEG, dimana aplikasi SIMPEG juga memuat seluruh data pegawai.

### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam pelaksanaan layanan perkantoran, Bapas Kelas II Lahat selalu berkoordinasi ke Kantor Wilayah terhadap kendala-kendala yang dihadapi.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 6 “Jumlah Kendaraan Bermotor”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator jumlah kendaraan bermotor merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan II. Dimana target jumlah kendaraan bermotor yakni 10 unit. Pada tahun 2023 realisasi jumlah kendaraan bermotor dapat terlaksana 10 unit, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 100%.

Tabel III.27 Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 6

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Kendaraan Bermotor	10 Unit	10 Unit	100%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah kendaraan bermotor}}{\text{Jumlah unit}} \times 100\% \\ &= \frac{10}{10} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-6 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

- 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya.**

Berdasarkan Perjanjian kinerja Tahun 2022, tidak terdapat Indikator kinerja kegiatan pada tahun tersebut sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan. Dalam pelaksanaannya kendaraan bermotor yang sudah ada merupakan kendaraan yang telah ada pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2023 hanya melakukan perawatan kendaraan bermotor yang sudah ada. Dimana diketahui untuk realisasi Jumlah Kendaraan Bermotor pada Tahun 2023 yaitu 10 unit dengan persentase Capaian Kinerja 100%.

Tabel III.28 Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 6

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kendaraan Bermotor	-	-	-	10 unit	10 unit	100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika di bandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2024 sama dengan Tahun sebelumnya yakni 10 unit. Target Kinerja untuk Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2023 adalah 10 unit dengan realisasi 100%. Dimana pada tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan tersebut.

Tabel III.29 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 6

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kendaraan Bermotor	-	-	10 unit	10 unit

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Jumlah Kendaraan Bermotor hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Bapas Kelas II Lahat telah memiliki 10 unit kendaraan bermotor, sehingga pada tahun 2023 pemeliharaan 10 unit kendaraan bermotor dilakukan secara berkala dengan baik.

### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Mengusulkan RKBMN/Anggaran untuk pengadaan kendaraan.

## • Indikator Kinerja Kegiatan 7 “Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi”

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan II. Capaian Kinerja indikator jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi diperoleh dari jumlah realisasi jumlah

perangkat pengolah data dan komunikasi dibagi dengan target jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%.

Tabel III.30 Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 7

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	54 Unit	54 Unit	100%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi}}{\text{Jumlah unit}} \times 100\% \\ &= \frac{54}{54} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-7 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian kinerja Tahun 2022, tidak terdapat Indikator kinerja kegiatan pada Tahun tersebut sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan. Dalam pelaksanaannya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang sudah ada merupakan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang telah ada pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2023 hanya melakukan perawatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang sudah ada. Dimana diketahui untuk realisasi Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Tahun 2023 yaitu 54 unit dengan persentase Capaian Kinerja 100%.

Tabel III.31 Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 7

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	-	-	54 unit	54 unit	100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target ditahun 2024 sama dengan Tahun sebelumnya yakni 54 unit. Target Kinerja untuk Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Tahun 2023 adalah 54 unit dengan realisasi 100%. Dimana pada tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan tersebut.

Tabel III.32 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 7

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	-	54 unit	54 Unit

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Bapas Kelas II Lahat telah memiliki 54 unit perangkat pengelola data dan komunikasi dalam menunjang berhasilnya kegiatan perkantoran. Semua perangkat pengelola data dan komunikasi dilakukan pemeliharaan secara berkala.

### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Mengusulkan RKBMN/Anggaran untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

## • Indikator Kinerja Kegiatan 8 “Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran”

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan II. Capaian Kinerja indikator j Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran diperoleh dari jumlah realisasi Jumlah Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran dibagi dengan target Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%

Tabel III. 33 Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 8

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	52 Unit	52 Unit	100%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran}}{\text{Jumlah unit}} \times 100\% \\ &= \frac{52}{52} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-8 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian kinerja Tahun 2022, tidak terdapat Indikator kinerja kegiatan pada tahun tersebut sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan. Dalam pelaksanaannya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang sudah ada merupakan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang telah ada pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2023 hanya melakukan perawatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang sudah ada. Dimana diketahui untuk realisasi Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Tahun 2023 yaitu 52 unit dengan persentase Capaian Kinerja 100%.

Tabel III.34 Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 8

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	-	-	52 unit	52 unit	100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target tahun 2024 sama dengan Tahun sebelumnya yakni 52 unit. Target Kinerja untuk Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tahun 2023 adalah 52 unit dengan realisasi 100%. Dimana pada tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan tersebut.

Tabel III.35 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 8

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	-	52 unit	52 unit

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Bapas Kelas II Lahat telah memiliki 52 unit peralatan dan fasilitas perkantoran dalam menunjang berhasilnya kegiatan perkantoran. Semua peralatan dan fasilitas perkantoran dilakukan pemeliharaan secara berkala.

### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.

## • Indikator Kinerja Kegiatan 9 “Jumlah Gedung / Bangunan”

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator jumlah gedung/bangunan merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan II. Capaian Kinerja jumlah gedung/bangunan diperoleh dari jumlah realisasi jumlah gedung/bangunan dibagi dengan target jumlah gedung/bangunan dikali dengan 100% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah gedung/bangunan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 1

unit. Telah tercapai realisasinya sebesar 1 unit sehingga capaian kinerja diperoleh 100%.

Tabel III. 36 Capaian Target dan Realisasi SK II dan IKK 9

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Gedung / Bangunan	1 Unit	1 Unit	100%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Gedung / Bangunan}}{\text{Jumlah unit}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian atas indikator kegiatan ke-9 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya.

Berdasarkan Perjanjian kinerja Tahun 2022, tidak terdapat Indikator kinerja kegiatan pada tahun tersebut sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan. Dalam pelaksanaannya Gedung / Bangunanyang sudah ada merupakn Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang telah ada pada tahun-tahun sebelumnya, yang merupakan gedung/bangunan hibah berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten Lahat, akan tetapi pihak TNI KODIM 405 Lahat (KODAM II SRIWIJAYA) menyatakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah milik TNI AD sehingga pada tahun 2023 hanya melakukan perawatan gedung/bangunan yang sudah ada. Dimana diketahui untuk realisasi Jumlah gedung/bangunan pada Tahun 2023 yaitu 1 unit dengan persentase Capaian Kinerja 100%.

Tabel III.37 Perbandingan Capaian Kinerja SK II dan IKK 9

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	-	-	1 unit	1 unit	100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target ditahun 2024 sama dengan Tahun sebelumnya yakni 1 unit. Target Kinerja untuk Jumlah gedung/bangunan Tahun 2023 adalah 1 unit dengan realisasi100%. Dimana pada tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat indicator kinerja kegiatan tersebut.

Tabel III.38 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 9

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kendaraan Bermotor	-	-	1 unit	1 Unit

### 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Jumlah gedung/bangunan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Penyebab Keberhasilan

Tanah Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Lahat, akan tetapi pihak TNI KODIM 405 Lahat (KODAM II SRIWIJAYA) menyatakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah milik TNI AD sehingga tanah Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat masuk kategori K2 yaitu berkas-berkas lengkap tetapi sengketa dengan pihak TNI.

### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat melalui Kaur TU telah melakukan koordinasi kembali ke pihak TNI untuk menghibahkan ke kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat akan tetapi pihak TNI tidak dapat memberikan hibah karena masuk peta wilayah tanah eks lapangan tembak skip dengan luas 639,1787 hektar no register : 30405006 Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat juga telah melakukan koordinasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan akan melaporkan kepada Pimpinan Tinggi (Pimti) dan akan melakukan koordinasi dengan pihak TNI.

## B. REALISASI ANGGARAN

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2023 yang efektif dan efisien digambarkan dengan organisasi yang tepat fungsi dan ukuran yang memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan, sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan perannya organisasi dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan efisiensi pelaksanaan digambarkan dalam sistem prosedur yang baik dengan rasio sarana dan prasarana kerja yang proporsional. Selain dilihat dari pengukuran persentase kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari segi keuangan, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Akuntabilitas Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel III.39 Persentase Capaian Kinerja pada Sasaran Kegiatan Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2023

Sasaran	Anggaran	Penyerapan	Persentase (%)
Sasaran I	Rp. 564,845,000.00	Rp. 564,699,000.00	99.97 %
Sasaran II	Rp. 3,168,512,000.00	Rp. 3,130,597,033.00	98.80 %
Jumlah	Rp. 3,733,357,000.00	Rp.3,695.296.033.00	98.98%

Sumber : Hasil olah data dari aplikasi SAKTI Tahun 2023

Berdasarkan tabel III.39 di atas, pada Sasaran Kegiatan I, Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai standar, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja, yaitu : Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga, Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara, dan Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya telah mencapai persentase penyerapan sebesar 99.97 % dengan penyerpan anggaran hingga Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 564,699,000.00 dan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.564,845,000.00

Pada Sasaran Kegiatan II, Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker, dengan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja, yakni : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu, Tersusunnya dokumen

pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan, Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan, Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, Jumlah Layanan Perkantoran, Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, dan Jumlah Gedung/ Bangunan, telah mencapai persentase penyerapan anggaran sebesar 98.80%, dengan penyerpan anggaran hingga Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 3,130,597,033.00 dan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3,168,512,000.00.

Sehingga diketahui hingga Bulan Desember 2023 seluruh penyerapan anggaran Sasaran Kegiatan telah mencapai Rp.3,695.296.033.00 dan persentase 98.98% dengan Anggaran yg tersedia

Rp. 3,733,357,000.00. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang telah ditetapkan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat telah berjalan dengan baik.

Tabel III.40 Rincian Pagu serta Realisasi Anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Per Jenis Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Belanja Pegawai	Rp2.183.109.000,-	Rp2.096.827.125,-	96.05%	Rp2.148.733.000,-	Rp 2.128.276.743,-	99.05%
2.	Belanja Barang	Rp1.775.125.000,-	Rp 1.557.948.941,-	87.77%	Rp1.492.165.000,-	Rp 1.474.867.490,-	98.84 %
3.	Belanja Modal	Rp 36.000.000,-	Rp 35.042.630,-	97.34%	Rp 92.459.000,-	Rp 92.151.800,-	99.67%
Total		Rp3.994.234.000-	Rp 3.689.818.696,-	92.38%	Rp 3,733,357,000,-	Rp 3.695.296.033,-	98.98 %

Sumber : Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja pegawai di Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat selama Tahun 2023 telah mencapai 99.05%. Hal ini jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2022 terjadi peningkatan 3%, dimana capaian realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 ialah 96.05% . Peningkatan ini terjadi dikarenakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dilakukan sesuai rencana dan target yang telah ditentukan.

Realisasi belanja barang di Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat selama Tahun 2023 telah mencapai 98.84%. Hal ini jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja barang pada Tahun 2022 terjadi peningkatan 11.07%, dimana capaian realisasi belanja barang tahun 2022 ialah 87.77%. Peningkatan ini terjadi dikarenakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dilakukan sesuai rencana dan target yang telah ditentukan.

Realisasi belanja modal di Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat selama Tahun 2023 telah mencapai 99.67%. Hal ini jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja modal pada Tahun 2022 terjadi peningkatan 2.33%, dimana capaian realisasi belanja modal tahun 2022 ialah 97.34%. Secara keseluruhan realisasi anggaran yang telah di capai oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat sebesar 98.98% pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa kegiatan yang telah ditetapkan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat telah berjalan dan dilaksanakan.

### C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

#### 1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART-DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat empat variabel yaitu capaian keluaran dengan bobot 99.41%; penyerapan anggaran dengan bobot 91.32%; efisiensi dengan bobot 8,38%; dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir) dengan bobot 97.9%. Berikut adalah capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat berdasarkan Aplikasi SMART DJA pada Tahun 2023:



Gambar III.3 Screenshot Aplikasi SMART-DJA Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas, nilai penyerapan atau realisasi anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Pada Tahun 2023 sebesar 91.32%. Nilai Konsistensipenyerapan atau realisasi anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Pada Tahun 2023 sebesar 97.9%. Nilai efisiensi realisasi anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Pada Tahun 2023 sebesar 70.94%. Sehingga nilai SMART yang diperoleh Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat sebesar 90.21 dengan kategori sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan dan realisasi anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat telah berjalan dan kegiatan yang direncanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat telah terlaksana dengan baik.

## 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Ket	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Penggunaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Revisi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
Nilai	100	83.74	100.00	94.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.80	100%	98.00
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
Nilai Akhir	10.00	8.37	20.00	94.40	10.00	10.00	5.00	25.00			
Nilai Aspek	91.87		98.80					100.00			

Gambar III.4 Dashboard Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023

Sumber : Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu revisi DIPA dengan bobot 10%; revisi halaman III DIPA dengan bobot 10%; data kontrak dengan bobot 10%; penyelesaian tagihan dengan bobot 10%; pengelolaan UP dan TUP dengan bobot 10%, dispensasi SPM dengan bobot 10%; penyerapan anggaran dengan bobot 20%; dan capaian output dengan bobot 25%. Nilai IKPA yang diperoleh Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 pada aplikasi

OM-SPAN Kemenkeu sebesar 98.00 dengan kategori baik. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan dan realisasi anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat telah berjalan dengan baik dan kegiatan yang direncanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat telah terlaksana dengan baik.

Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2023 didapat dari formula persentase penjumlahan 60% Nilai SMART dan 40% Nilai IKPA, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

**Capaian Kinerja SMART 2023 = 90.21 X 60% = 54.126%**

**Capaian Kinerja IKPA 2023 = 98 X 40% = 39.2 %**

**Total Capaian Kinerja pada SMART dan IKPA 2023 = 93.81%**

#### D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

##### 1. E-performance Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/ sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Pelaporan kinerja melalui aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

This screenshot shows a financial statement table with a red header. The table is organized into columns for various financial metrics. A prominent green vertical bar highlights a specific column, likely representing a total or a key performance indicator. The data rows contain numerical values and some text descriptions.

This screenshot displays a financial statement table with a red header. The table structure is consistent with the previous image, featuring columns for financial data. A green vertical bar highlights a column, and the table contains numerical entries and descriptive text.

This screenshot shows a financial statement table with a red header. The table layout includes columns for financial information, with a green vertical bar highlighting a column. The content consists of numerical data and text labels.



Gambar III.5 Screenshot Aplikasi E-performance Tahun 2023

## 2. E-Tarja (Target Kinerja)

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan kondisi positif yang ingin diwujudkan atau kondisi negatif yang ingin dihilangkan. Sedangkan kerja adalah strategi/cara untuk

mencapai kinerja, melalui program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran. Berikut Target Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.



Gambar III.6 Screenshot Aplikasi E-Tarja Tahun 2023

### 3. E-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kinerja Kementerian atau Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui keluaran-keluaran prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga). Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bapennas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat Tahun 2023:



Gambar III.7 Screenshot Aplikasi e-Monev BAPPENAS

Berdasarkan gambar di atas Kelengkapan pelaporan data realisasi komponen yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat pada setiap bulannya datanya 100% lengkap. Kemudian untuk kelengkapan pelaporan data realisasi rincian output pada setiap bulannya juga datanya 100% lengkap. Berdasarkan data realisasi yang telah disajikan penggunaan dan realisasi anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat telah berjalan dengan baik dan kegiatan yang direncanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat telah terlaksana dengan baik.

#### 4. Kegiatan Prioritas Nasional

Berdasarkan Prioritas Nasional 7 Kemenkumham 2023 “Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik”, Bapas Kelas II Lahat pada Tahun 2023 telah melakukan, yakni :

1. Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan.
2. Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas) untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif.

Berikut Prioritas Nasional 7 Kemenkumham 2023 “Memperkuat Stabilitas POLHUKHANKAM dan Transformasi Pelayanan Publik”:



Gambar III.8 Screenshot Prioritas Nasioal Kemenkumham 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Tahun 2023. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasarakatan, kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2023 sebagai wujud pertanggung jawaban publik.

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat beserta jajarannya telah melaksanakan perjanjian kinerja secara baik. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja yang telah memenuhi target. Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hal tersebut juga ditunjang oleh program kerja berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang jelas, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk operasional yang dapat dipahami oleh pegawai di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat, adanya koordinasi dan komunikasi yang baik, serta kualitas aparatur yang baik dilihat dari tingkat pendidikannya. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2023 adalah:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM.
2. Terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasarakatan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasarakatan.
4. Belum berjalannya proses pemasarakatan secara optimal, seperti masih adanya Klien yang belum menyadari tanggung jawab dan kewajiban.

5. Adanya Klien yang melakukan pengulangan tindak pidana pada masa PB, CB dan CMB.

## **B. SARAN**

Mengatasi permasalahan-permasalahan di atas untuk meningkatkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat khususnya dalam pencapaian sasaran kegiatan harus dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan maupun diklat teknis.
3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan.
4. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap Klien Pemasarakatan maupun terhadap Petugas Pemasarakatan.
5. Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya baik manusia maupun dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil.
6. Terkait penyerapan anggaran, harus segera melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan dan menyusun jadwal untuk meningkatkan ketepatan realisasi anggaran.
7. Agar menggunakan anggaran seefektif dan seefisien mungkin.
8. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti pimpinan dan pegawai.

## LAMPIRAN

## Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT  
DENGAN  
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Perimansyah, S. Sos  
Jabatan : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dadi Mulyadi, Bc.I.P., S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Divisi Pemasarakatan  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lahat, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Divisi Pemasarakatan  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan HAM Sumatera Selatan

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

Dadi Mulyadi, Bc.I.P., S.H., M.H  
NIP. 19630109 198703 1 001

Perimansyah, S.Sos  
NIP.19681106 199203 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT**  
**DENGAN**  
**KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakandan Pelayanan Hukum	Rp. 1.023.370.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 1.023.370.000,-
Program DukunganManajemen	Rp. 2.480.111.000,-
DukunganManajemen dan Teknis Lainnya IPT Pemasyarakatan	Rp. 2.480.111.000,-

Lahat, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan HAM Sumatera Selatan

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat



Dadi Mulyadi, Bc.I.P., S.H., M.H  
NIP. 19630109 198703 1 001

Perimansyah, S. Sos  
NIP. 19681106 199203 1 002

## Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2023



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Perimansyah  
Jabatan : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Iham Djaya  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

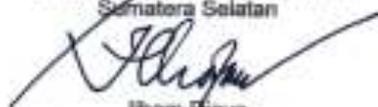
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

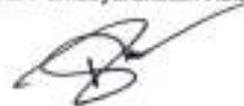
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan

  
Iham Djaya  
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat



Perimansyah  
NIP. 196811061992031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT DENGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 85 85

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga 2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara 3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	60% 55% 35%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan 1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	10 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	54 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	52 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 564.845.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 564.845.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.662.493.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 2.662.493.000,-

Palembang, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementegian Hukum dan HAM  
Sumatera Selatan



Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat



Perimansyah  
NIP. 196811061992031002

### Piagam Penghargaan Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat

